



# HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 18, No. 1, April 2004

ISSN - 0215-8809

- ▣ **PELURUSAN MATERI PENGAJARAN SEJARAH INDONESIA :  
SUATU DEMITOLOGISASI**  
G. Moedjanto
- ▣ **PERISTIWA G 30 S 1965 DAN PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK**  
A. Kardiyat Wiharyanto
- ▣ **DEMOKRASI DI INDONESIA**  
A.A. Padi
- ▣ **MANFAAT PENGGUNAAN TEORI-TEORI DAN  
KONSEP-KONSEP ILMU-ILMU SOSIAL BAGI ILMU SEJARAH**  
Yustiana Kameng
- ▣ **PERANG DINGIN UNI SOVIET, DAN EROPA**  
Sutarjo Adisusilo, J.R.
- ▣ **LORONG-LORONG MENUJU PEMBENTUKAN PAKISTAN**  
B. Musidi
- ▣ **SERI ARTIKEL FILSAFAT CINA: KONFUSIANISME**  
Hieronymus Purwanta

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra  
Universitas Sanata Dharma  
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

# HISTORIA VITAE

## SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

---

### DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	
Editorial .....	ii-ii
Pelurusan Materi Pengajaran Sejarah Indonesia: Suatu Demitologi .....	1-5
<i>G. Moedjanto</i>	
Peristiwa G30S 1965 dan Peralihan Kekuasaan Politik .....	6-19
<i>A. Kardiyat Wiharyanto</i>	
Demokrasi di Indonesia .....	20-30
<i>A.A. Padi</i>	
Manfaat Penggunaan Teori-Teori dan Konsep-Konsep Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Sejarah .....	31-45
<i>Yustiana Kameng</i>	
Perang Dingin, Uni Soviet, dan Eropa .....	46-69
<i>Sutarjo Adisusilo J.R.</i>	
Lorong-Lorong Mnuju Pembentukan Pakistan .....	70-80
<i>B. Musidi</i>	
Seri Artikel Filsafat Cina: Konfusionisme .....	81-94
<i>Hieronymus Purwanta</i>	

## Seri Artikel Filsafat Cina KONFUSIANISME

Hieronymus Purwanta

### A. Pengantar

Berbeda dengan masyarakat Asia Selatan dan Arab yang mengembangkan kebudayaannya pada pengutamaan religi, masyarakat Cina justru lebih mengembangkan pemikiran ke arah filsafat manusia. Mereka tidak menyerahkan nasib dan peruntungan pada dunia gaib, tetapi berusaha mengolah rasa dan pikiran untuk menemukan jalan mencapai kebahagiaan. Olah rasa dan pikiran yang bermuara pada lahirnya pemikiran filsafat di Cina itu merupakan realitas historis yang menarik, karena fenomena tersebut tidak terjadi pada masyarakat Asia Timur lainnya dan juga masyarakat Asia Tenggara.

Salah satu aliran filsafat yang pengaruhnya sangat besar dalam sejarah Cina adalah Konfusianisme. Aliran ini tidak saja mampu menerobos ke lingkungan penguasa (istana kerajaan dan kekaisaran), tetapi berhasil berkembang menjadi salah satu icon peradaban Cina. Konfusianisme tumbuh menjadi simbol kebaikan tertinggi karakter masyarakat Cina. Seorang penguasa akan dianggap baik apabila menjadi pengikut setia Konfusianisme dan mampu menerapkan berbagai ajaran-ajarannya. Bahkan pada masa-masa abad masehi ajaran Konfusianisme dijadikan alat seleksi dalam penerimaan pegawai istana. Seseorang akan diterima menjadi pegawai negara apabila lulus ujian yang bermaterikan ajaran Konfusianisme.

Oleh karena begitu sentralnya peran Konfusianisme dalam sejarah Cina, maka pada kesempatan ini penulis akan mencoba mengkajinya dalam bentuk artikel. Permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Latar belakang kemunculan Konfusianisme.
2. Ajaran pokok Konfusianisme.

### B. Latar Belakang Kemunculan Konfusianisme

#### 1. Proses Peperangan

Konfusianisme lahir dan mulai berkembang ketika pemerintahan dinasti Chou mengalami kemerosotan yang berpuncak pada terjadinya perang saudara yang berlangsung lama (771 - 221 SM). Perang tersebut dipicu oleh semakin seringnya bangsa-bangsa nomad (dalam historiografi tradisional Cina sering disebut sebagai bangsa barbar) masuk ke wilayah Kerajaan Chou dan melakukan perampokan terhadap masyarakat Cina yang mengembangkan pertanian menetap. Serbuan suku bangsa nomad yang paling serius mengancam eksistensi Kerajaan

---

*Drs. Hieronymus Purwanta, M.A., adalah dosen Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.*

Chou datang dari suku Jung (keturunan Turk) pada tahun 771 Sebelum Masehi (SM). Mereka melalui sebuah aliansi dengan masyarakat negara Shen berhasil melumpuhkan pertahanan ibukota dan berhasil masuk ke istana. Setelah berhasil menghancurkan ibukota dan membunuh Chou Yu Wang, mereka kemudian mengangkat putera mahkota P'ing menjadi raja Chou yang baru.<sup>1</sup>

Oleh karena keadaan ibukota telah rusak dan dipandang sulit untuk dapat dipulihkan, maka putera mahkota, P'ing, kemudian memindahkan ibukota Kerajaan Chou ke daerah Loyang yang telah dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Chou. Ibukota baru itu terletak di sebelah timur Hao (ibukota lama), sehingga sejak kepindahan itu dalam sejarah Cina dikenal sebagai periode Chou Timur.

Salah satu trend yang menonjol pada periode Chou Timur adalah adanya jurang pemisah antara pemerintah pusat dengan para penguasa feodalnya semakin lebar. Para penguasa feodal yang semakin disibukkan oleh urusan daerah kekuasaan masing-masing tampak semakin tidak mempedulikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kerajaan. Bahkan kekalahan terhadap bangsa nomad oleh para penguasa feodal dipandang sebagai pertanda bahwa *T'ien* (baca: "Thian" yang kemudian di daerah Melayu menjadi "Tuhan") telah tidak lagi berpihak pada raja Chou. Di kalangan penguasa feodal ada kecenderungan baru untuk tidak hanya tidak peduli, tetapi tidak mengindahkan kepentingan pemerintah pusat. Bahkan beberapa dari mereka yang wilayahnya jauh dari ibukota (terutama di daerah perbatasan) mulai berani memperluas wilayah kekuasaannya. Pemerintah pusat tidak mampu berbuat banyak untuk mengatasi tindakan para penguasa feodalnya. Akibatnya perang perebutan wilayah kekuasaan menjadi semakin meluas.

Periode perang yang dimotori oleh para penguasa feodal dalam historiografi tradisional Cina dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Musim Semi Musim Gugur atau *ch'un-ch'iu* dan periode Negara Berperang atau *ch'an-kuo*. Pada periode Musim Semi Musim Gugur (MSMG) peperangan masih dilakukan secara sederhana dengan menerapkan etika perang secara ketat. Semangat untuk menjunjung tinggi nilai keperwiraan masih kuat dipegang oleh pihak-pihak yang berperang.<sup>2</sup>

Kesederhanaan perang menjadikan periode MSMG tidak terlalu banyak membawa korban yang besar, baik ditinjau dari korban jiwa maupun harta benda. Negara yang kalah tidak kemudian menjadi hancur atau menimbulkan kerugian sangat besar. Selain itu, secara politis negara-negara itu masih tetap sebagai negara yang merdeka. Kepada negara pemenang perang, mereka hanya diminta untuk

---

<sup>1</sup> P'ing merupakan anak Chou Yu Wang yang diangkat menjadi putera mahkota. Akan tetapi, sejak kehadiran Po Ssu, dia disingkirkan dari istana bersama ibunya. Penyingkiran itulah yang menyulut peperangan antara Shen yang merupakan negara asal ibu P'ing dengan istana Chou. Lihat Nio Joe Lan, *Tiongkok Selajang Pandang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm. 32-33 dan Kenneth Scott Latourette, *The Chinese: Their History and Culture* (New York: The Macmillan Company, 1951), hlm. 44.

<sup>2</sup> W.G.J. Rummelink, *Sejarah Cina*. (Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 9.

mengakui supremasinya saja. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu kemudian negara yang kalah dapat bangkit kembali dan melanjutkan peperangan. Akibatnya, perang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (771 - 481 SM). Di samping itu, meskipun memandang bahwa *T'ien* tidak lagi berpihak kepada Kerajaan Chou, para penguasa feodal masih menghormati dinasti Chou sebagai pihak yang sah menduduki jabatan raja. Hal itu terlihat dari tidak satupun penguasa feodal yang berani mengangkat diri sebagai raja atau pada periode Negara Berperang metode perang berkembang dengan cepat, sehingga pertempuran berlangsung semakin keras. Perkembangan itu antara lain tampak pada penggunaan kuda untuk berperang. Pada periode sebelumnya, kuda hanya dipergunakan sebagai hewan pengangkut dan penghela kereta. Dengan difungsikannya sebagai kuda tempur, tumpuan kekuatan pasukan tidak lagi pada prajurit infantri, tetapi pada prajurit kavaleri.<sup>3</sup>

Penggunaan kuda menjadikan mobilitas prajurit dapat ditingkatkan. Perintah perpindahan pasukan juga dapat dilakukan secara cepat, sehingga secara tidak langsung strategi perang pun berkembang. Untuk mempercepat pencapaian kemenangan, para penguasa feodal mengembangkan lebih lanjut sistem perekrutan prajurit dari kelas petani yang semakin populer pada pertengahan periode MSMG. Apalagi ditunjang oleh perkembangan baru dalam pertempuran, yaitu suku-suku barbar melibatkan diri dalam perang sebagai pesaing yang cukup tangguh. Kekuatan pasukan tempur berkembang menjadi alat penghancur kehidupan yang sangat efektif ketika digunakannya besi dalam teknologi persenjataan.<sup>4</sup>

Pada periode Negara berperang, pihak yang kalah benar-benar mengalami kehancuran dan hampir tidak mungkin dapat menyusun kembali kekuatannya dalam waktu singkat. Apalagi negara pemenang langsung menguasai dan mengatur pemerintahan di negara yang dikalahkan. Akibatnya perang memunculkan penguasa-penguasa yang memiliki wilayah kekuasaan luas. Bahkan tidak sedikit dari para pemenang yang berani menggunakan gelar sebagai raja atau wang. Penggunaan gelar itu dipelopori oleh penguasa negara Wu (salah satu negara yang muncul di Cina bagian selatan. Penguasanya termasuk suku barbar).<sup>5</sup>

## 2. Akibat Perang

Dua periode perang yang berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Chou Timur, membawa pengaruh tidak terduga yang kompleks dalam tata kehidupan masyarakat Cina. Secara kultural, perang mengakibatkan terjadinya perluasan jangkauan pengaruh kebudayaan Cina (Chou). Berbagai suku barbar, seperti Yueh dan Tai di Cina selatan, pada awalnya berada di luar jangkauan

---

<sup>3</sup> Diperkirakan penggunaan kuda dalam peperangan merupakan tradisi baru dalam masyarakat Cina sebagai hasil adopsi dari tradisi suku-suku nomad di sekitarnya. Lihat Derk Bodde, *China's First Unifier: A Study of The Ch'in Dynasty as Seen in The Life of Li Ssu* (Leiden: E.J. Brill, 1938), hlm. 9-10.

<sup>4</sup> Negara yang pertama kali mengembangkan besi dalam teknologi persenjataan, diperkirakan adalah negara Ch'in. Lihat Herman Kinder dan Werner Hilgemann, *Atlas of World History*. Volume I (Middlesex: Penguin Book Ltd., 1974), hlm. 41.

<sup>5</sup> W.G.J. Rummelink, op. cit., hlm. 8.

pengaruh dinasti Chou. Melalui keterlibatan mereka dalam peperangan, berbagai suku itu mulai berkenalan dan menyerap unsur-unsur kebudayaan Chou. Terjadinya perluasan pengaruh kebudayaan merupakan fase yang cukup penting peranannya dalam membentuk kesejajaran budaya dan pada tahap selanjutnya menjadi pendukung pembangunan kesatuan geopolitik di masa yang lebih kemudian.

Perang ternyata juga membawa perubahan dalam norma mobilitas sosial masyarakat Cina. Sebelum perang, yaitu masa berkembangnya feodalisme, struktur sosial masyarakat Chou cenderung bersifat tertutup. Dapat dikatakan pada masa itu hampir tidak mungkin terjadi kenaikan status sosial. Anak yang lahir dari orang tua petani, selama hidupnya juga hanya akan menjadi petani. Secara struktural tidak mungkin dia dapat menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan, meskipun seandainya mempunyai kemampuan yang memadai. Sebaliknya, anak yang lahir dari kelas bangsawan, meskipun seandainya kurang berkualitas, akan dengan mudah menjadi penguasa ketika dirinya dewasa. Dalam struktur sosial seperti itu, nasib seseorang lebih banyak ditentukan oleh keturunan (darah).

Dengan terjadinya perang, aturan mobilitas sosial mengalami perubahan yang cukup berarti. Perang menjadikan struktur sosial masyarakat Cina lebih bersifat terbuka dari pada masa sebelumnya. Perubahan itu tidak dapat dilepaskan dari usaha kaum bangsawan untuk memenangkan pertempuran. Usaha itu mereka lakukan, salah satunya, dengan jalan memperbanyak anggota pasukan tempur. Dari sinilah kaum bangsawan kemudian berusaha merekrut orang-orang dari kelas petani untuk dijadikan pasukan tempur.

Sistem *recruitment* kaum petani yang dimulai pada periode MSMG ternyata berkembang pesat pada periode Negara Berperang. Penggunaan tenaga petani sebagai pasukan perang, menurut penelitian Hsu Cho-yun, pada periode MSMG telah mencapai berkisar 25 %. Jumlah itu menunjukkan bahwa kesempatan kaum petani untuk naik status menjadi kelas prajurit semakin terbuka, meskipun sebagian besar anggota pasukan tetap diambilkan dari keturunan kelas prajurit. Jumlah anggota pasukan tempur yang berasal dari kelas petani meningkat cukup berarti pada periode Negara Berperang, yaitu mencapai sekitar 56%.<sup>6</sup>

Dari penelitian Hsu Cho-yun dapat diambil beberapa pemahaman. Pertama, peperangan membawa norma baru dalam mobilitas sosial masyarakat Cina. Setiap orang dapat menduduki jabatan tinggi, terutama dalam bidang kemiliteran, dengan syarat memiliki kemampuan yang memadai. Stratifikasi sosial berdasarkan darah pun telah digeser oleh norma baru yang menekankan penghargaan pada kualitas individu. Pengaruh perang yang kedua adalah terjadinya persaingan antara kelas petani dengan kelas bangsawan dalam usaha mencapai posisi kunci. Dari penelitian Hsu Cho-yun dapat dilihat bahwa secara kuantitas, petani telah menggeser dominasi kelas bangsawan dalam bidang kemiliteran. Dengan jumlah yang lebih besar tersebut, kelas petani akan

---

<sup>6</sup> Denis Twitchett and Michael Loewe, et al., ed., *The Cambridge History of China*. Volume I (New York: Cambridge University Press, 1986), hlm. 28-29.

mempunyai lebih banyak kesempatan untuk melahirkan tokoh-tokoh berkualitas yang mampu menduduki jabatan-jabatan penting dalam kemiliteran.

Dominasi kelas petani dalam kemiliteran merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang pada tahap selanjutnya akan mengubah pula tatanan politik yang berlaku di Cina. Kondisi darurat perang, tujuan pemerintahan yang utama adalah untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain dan apabila mungkin justru memenangkan pertempuran serta menguasai negara lain. Dilihat dari sudut pandang itu, tidaklah mengherankan apabila pada masa perang itu secara bertahap kaum sipil tersingkir dari pemerintahan. Sebagai penggantinya adalah kaum militer, karena merekalah yang memiliki kemampuan berperang, baik di bidang strategi maupun di bidang keterampilan bertempur. Dengan keahlian itu kaum militer mampu mengetahui seluk beluk pertahanan dan strategi untuk memenangkan suatu pertempuran. Akibatnya tahap demi tahap, kadang disertai kekerasan, kedua periode perang pada masa Chou Timur mendorong kaum militer muncul ke permukaan dan memegang peranan kunci dalam penentuan kebijakan politik negara. Kaum bangsawan yang pada masa damai memegang pemerintahan secara turun temurun, lambat laun tersingkir dari panggung politik Cina.<sup>7</sup> Kemunduran itu terutama dialami oleh kaum bangsawan tingkat tinggi. Hampir semua bangsawan penguasa feodal, dalam situasi perang tidak mampu mempertahankan kekuasaannya. Mereka kalah bersaing dengan para pemimpin militer dari kaum "yang tidak jelas asal usulnya".

Perubahan struktur sosial masyarakat Cina pada umumnya dan di lingkungan pemegang kekuasaan, secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya pergeseran pandangan masyarakat Cina akan kedudukan raja. Ketika kerajaan Chou masih kokoh berdiri dengan landasan feodalismenya, masyarakat Cina memandang bahwa jabatan raja hanya layak diduduki oleh keturunan Wu Wang. Hal itu disebabkan masyarakat percaya bahwa keluarga besar (marga) itulah yang memperoleh mandat untuk memerintah dunia. Akan tetapi, ketika perang bergolak dan kaum bangsawan tersingkir, pandangan itu bergeser. Dalam masyarakat mulai muncul dan berkembang pandangan baru bahwa siapa saja dapat menjadi raja. Pandangan itu tidak menyimpang, bahkan diperkuat dengan teori "perpindahan mandat" yang pernah digunakan oleh Wu Wang ketika meruntuhkan kekuasaan dinasti Shang dan mendirikan Kerajaan Chou. Dengan landasan itu, siapa saja dapat menjadi raja asalkan memperoleh *T'ien ming* (mandat Tuhan). Perubahan pandangan tentang status raja merupakan indikasi terdapatnya semangat untuk memperebutkan kedudukan sebagai raja. Para petualang politik yang merasa memiliki kekuatan berusaha merebut kekuasaan, sehingga perang perebutan tahta seakan menjadi sebuah tradisi. "Tradisi perebutan tahta" itu tidak hanya terjadi pada masa akhir dinasti Chou, tetapi mewarnai sepanjang sejarah Cina masa kekaisaran.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kemunduran kelas bangsawan dari panggung politik dijelaskan dengan cukup baik oleh Hsu, "Bangsawan dan Kekuasaan Raja " pada Sartono Kartodirdjo, *Elite Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 115.

<sup>8</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, *Ibid.*

Selain membawa pengaruh terhadap kemunculan kelompok petualang politik yang memperebutkan tahta, kemunduran bangsawan tinggi dari gelanggang politik juga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan. Ketika Kerajaan Chou berkuasa, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem feodal. Dalam sistem itu, penguasa daerah memiliki otonomi yang sangat besar dalam mengambil segala keputusan yang terkait dengan wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, ketika perang terjadi, sistem pemerintahan feodal dipandang tidak lagi efektif, sehingga tidak dapat dipertahankan.

Para penguasa yang berhasil mengalahkan negara lain, terutama pada periode Negara Berperang, tidak lagi mempercayakan pengelolaannya kepada orang lain atau penguasa yang dikalahkan. Kenyataan berbicara bahwa pemberian otonomi kepada penguasa daerah-daerah taklukan yang pernah dilakukan pada masa MSMG, seakan justru memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun kembali kekuatan dan berperang lagi melawan negara penakluk. Kenyataan itu mendorong lahirnya pola baru dalam pengelolaan daerah taklukan. Akhirnya muncul kebijakan bahwa daerah-daerah tersebut mereka kuasai dan perintah secara langsung.

Fenomena baru dalam pengelolaan daerah taklukan secara bertahap melahirkan sistem pemerintahan yang bersifat lebih sentralistis. Sistem pembagian wilayah lama, yaitu *fu-yung* dirombak dan otonomi pemerintah daerah dipangkas habis. Sebagai penggantinya muncul sistem pembagian wilayah yang baru, yaitu menjadi *chun* (propinsi) dan *hsin* (kabupaten/ prefektur).<sup>9</sup> Perubahan ke sentralisasi kekuasaan, selain didorong oleh faktor ketidakpercayaan, juga disebabkan oleh kebutuhan untuk memenangkan pertempuran.

Otonomi besar penguasa daerah yang terdapat pada sistem feodal memungkinkan terjadinya perbedaan strategi perang antara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam satu negara. Selain itu, sistem feodal juga memungkinkan terjadi adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah tentang strategi perang yang harus diambil. Dengan kata lain, koordinasi pertahanan dalam suatu negara sulit dilakukan, karena masing-masing pihak merasa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sendiri secara mandiri. Adanya kekuasaan yang terpusat berarti pembuatan keputusan dilakukan oleh satu pusat komando, sehingga pertahanan dan penyerbuan dapat direncanakan dan dikelola secara lebih efisien.

Selain bangsawan tinggi, kemerosotan juga dialami oleh bangsawan tingkat rendah. Ketika sistem feodal berlangsung, bangsawan tingkat rendah merupakan anggota birokrasi kerajaan, yang bertugas mengurus administrasi pemerintahan atau menjadi pegawai perpustakaan. Kekacauan yang diakibatkan oleh perang menjadikan berbagai urusan diabaikan, karena yang terpenting adalah mempertahankan negara dari serbuan negara lain dan apabila mungkin

---

<sup>9</sup> Derk Bodde, *op. cit.*, hlm. 135.



menaklukan wilayah lain. Di pihak lain, mereka tidak memiliki keahlian yang mampu mendukungnya untuk melibatkan diri secara aktif dalam usaha memenangkan peperangan. Akibatnya mereka seakan menjadi orang yang salah dan berada pada waktu dan tempat yang kurang tepat.

Para bangsawan tingkat rendah yang keahliannya hanya mengurus administrasi secara bertahap kehilangan peranan dan bahkan juga pekerjaan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, menjadi hal yang wajar apabila mereka kemudian menjadi membenci peperangan. Di samping menjadikan kaum bangsawan rendahan sebagai "eks birokrat" yang tidak lagi mempunyai pekerjaan, perang juga mengakibatkan kehancuran dan kesengsaraan bagi masyarakat luas. Dalam situasi perang, hukum formal tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Yang berlaku dalam masyarakat umum adalah hukum rimba: Siapa yang kuat akan menang dan dapat berbuat semaunya. Tata krama atau *li* dan nilai-nilai kebajikan lainnya tidak lagi diperhatikan. Manusia menjadi hanya mementingkan diri sendiri, dengan alasan menjaga diri sendiri agar tetap *survive* merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang justru menggunakan kekacauan perang sebagai kesempatan untuk menjadi serakah. Akibatnya secara luas terjadi degradasi moral yang antara lain berbentuk berkembangnya perilaku menyimpang dan meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Meskipun perang membawa berbagai dampak negatif, tidak dapat dipungkiri bahwa perang juga membawa kemajuan yang sangat bernilai bagi peradaban manusia. Salah satu pengaruh positif langsung dari adanya perang adalah lahirnya kesadaran bahwa perang banyak membawa kehancuran dan kesengsaraan. Kesadaran itu mulai muncul antara lain di kalangan para bangsawan rendahan. Mereka terkena akibat perang secara langsung, yaitu kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, kesialan tersebut justru memberikan kepada mereka waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka tentang hidup dan kehidupan manusia terkait dengan peperangan. Dengan kata lain, peperangan menjadikan mereka tertantang untuk mempertanyakan sekaligus mencari jawaban atas problem yang mereka dan masyarakat hadapi.

Kesadaran akan berbagai dampak negatif peperangan yang muncul dari kalangan eks birokrat mendorong mereka untuk mencari penyebabnya. Setelah menemukan faktor penyebab, kelompok itu juga berusaha mencari jalan pemecahannya, sehingga rakyat dapat kembali hidup normal dan mencapai kebahagiaan sempurna. Sikap kritis terhadap situasi yang termanifestasi pada usaha mencari penyebab problem sosial dan usaha menemukan jalan keluarnya, menjadikan kelompok eks birokrat dapat dikatakan sebagai embrio kelas baru yang nantinya berperan besar dalam masyarakat Cina, yaitu kelas intelektual atau yang lebih dikenal sebagai sastrawan. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mencapai kebahagiaan. Tidak jarang mereka tinggal dalam

---

<sup>10</sup> Fung Yu Lan, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina: Sejak Confusius Sampai Han Fei Tzu*. Terjemahan Soejono Soemargono (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm.39-47.

jangka waktu tertentu yang cukup lama di suatu negara, karena nasehat dan pemikirannya dibutuhkan oleh penguasa negara itu.

Masing-masing dari kaum intelektual Cina memiliki dan mengembangkan pemikirannya sendiri tentang bagaimana hidup yang dianggap baik dan benar. Mereka mendirikan aliran sendiri-sendiri, sehingga dapat dibayangkan bahwa akhirnya dalam masyarakat terdapat banyak pandangan dan ajaran yang lahir. Oleh karena sangat banyak aliran yang berkembang, masyarakat Cina menyebutnya sebagai "Seratus Aliran Filsafat". Untuk hal-hal yang jumlahnya sangat banyak, bangsa Cina menyebutnya dengan istilah "Seratus". Penyebutan itu dapat disejajarkan dengan istilah "Seribu" yang sering digunakan oleh bangsa Indonesia.

Tokoh-tokoh eks birokrat yang mencuat karena ajarannya diikuti oleh banyak orang antara lain adalah Konfusius, Mencius, Hsun-tzu, Lao-tzu, Shang Yang, Li Ssu dan Han Fei-tzu. Tindakan yang diambil oleh kelompok eks birokrat, yaitu mengajar tentang filsafat manusia, secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya suatu revolusi dalam bidang pendidikan. Pada jaman feodal berlangsung, pendidikan lebih banyak ditujukan untuk menciptakan manusia pekerja yang terampil. Para bangsawan biasanya menyewa seorang guru untuk secara privat mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara mengerjakan pembukuan, mengelola perpustakaan dan sejenisnya. Sistem pendidikan seperti itu bertujuan agar peserta didik siap bekerja sebagai pegawai administrasi dalam birokrasi Kerajaan Chou. Meskipun demikian, pada umumnya kaum bangsawan juga membekali anak-anak mereka dengan pengetahuan tentang tata krama. Pendidikan tatakrama itu dalam pengertian mempelajari dogma-dogma tentang bagaimana perilaku yang baik, tanpa mengajak siswa berpikir mengapa dan bagaimana dogma-dogma itu diadakan.

Dengan munculnya kaum intelektual, sistem pengajaran lama segera menjadi ketinggalan jaman. Sistem itu dipandang hanya menciptakan robot-robot (manusia tidak berjiwa) yang tidak mampu mempertanyakan dasar-dasar penilaian tentang benar salah, baik buruk dari suatu tindakan. Kepada para siswa tidak diajarkan untuk menjadi orang yang memiliki integritas pribadi. Akibatnya, produk pendidikan model lama adalah orang-orang yang tidak mampu mencegah terjadinya penyelewengan. Ketika atasan bertindak salah, mereka tidak berani menegur, apalagi menentangnya. Dengan adanya revolusi sistem pendidikan, pengajaran tidak lagi semata-mata berorientasi untuk menciptakan manusia terampil. Kepada peserta didik terutama diberikan materi pengetahuan yang mengembangkan daya penalaran dan perasaan. Pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan menjadi unsur sentral dalam pendidikan, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang berpribadi dan berani mengambil sikap berdasarkan pandangan pribadi.

### **C. Konfusianisme**

Konfusianisme merupakan nama aliran yang diambil dari nama seorang tokoh pemikir, yaitu Konfusius. Dia dianggap sebagai peletak dasar ajaran

Konfusianisme. Muridnya cukup banyak dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Di antara para pengikutnya, terdapat dua tokoh yang terkenal, yaitu Hsun Tzu dan Meng Tzu (Mencius).

Pandangan dasar Konfusianisme adalah bahwa kehidupan yang tertib, damai dan bahagia merupakan impian setiap orang. Dalam kerangka itu, penguasa menjadi salah satu faktor kunci terwujud atau tidaknya cita-cita tersebut. Apabila penguasanya berkarakter lalim, mau tidak mau masyarakatnya akan mengalami tekanan dan penderitaan. Jika penguasanya baik, penuh kebajikan memperhatikan dan bahkan mengutamakan kepentingan rakyat, niscaya masyarakat akan hidup dengan penuh kesejahteraan dan ketenteraman yang merupakan bagian penting dari perwujudan keharmonisan semesta.

## **1. Konfusius**

Pentingnya karakter moral penguasa dapat dipahami salah satunya dari pandangan Konfusius atau Kung Fu-tzu. Dia memandang suatu masyarakat sebagai suatu struktur. Setiap lembaga merupakan sub struktur yang memiliki kewajiban memenuhi tujuan struktur besarnya. Oleh karena itu, setiap sub struktur atau sub-sub struktur harus memahami kedudukannya di dalam keseluruhan struktur. Ungkapan yang terkenal dari Konfusius adalah: "Hendaknya seorang penguasa bersikap sebagai penguasa, seorang menteri bersikap sebagai menteri, seorang ayah bersikap sebagai ayah dan seorang anak bersikap sebagai anak".<sup>11</sup>

Dari ungkapan itu dapat dipahami bahwa pengetahuan tentang kedudukan seseorang atau lembaga di dalam keseluruhan struktur akan mendorongnya bertindak sesuai tugas, fungsi dan kedudukannya. Pengetahuan tentang kedudukan dan fungsi setiap bagian dalam keseluruhan struktur tidak datang dari langit. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan benar tentang kedudukan atau status serta fungsinya dalam keseluruhan struktur, diperlukan suatu proses pendidikan. Di sinilah pentingnya lembaga pendidikan. Dengan menempatkan pendidikan sebagai sentral dari proses pencapaian pemahaman, Konfusius telah mengubah secara mendasar tujuan suatu pendidikan. Secara tradisi pendidikan adalah lembaga yang memproduksi tenaga terampil yang siap menuruti perintah penguasa. Menurut Konfusius lembaga pendidikan seperti itu tidak mencukupi, karena tidak mampu memberi landasan moral, nilai dan norma bagi peserta didiknya yang akan menjadi hal yang penting perannya ketika mereka menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan.

Tanpa berusaha meremehkan peranan lembaga pendidikan, menurut pandangan Konfusius, proses pendidikan dapat dilakukan tidak hanya melalui lembaga yang resmi. Pendidikan juga dapat dilakukan melalui pengamatan dan pengalaman langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam masyarakat terdapat berbagai nilai dan norma. Semua itu akan baik bila dijalankan dengan semestinya, karena dapat mengembangkan kemampuan berbuat baik yang

---

<sup>11</sup> Lihat pada Nio Joe Lan, *op. cit.*, hlm. 41. Juga Hsu "Bangsawan dan Kekuasaan Raja" yang terdapat pada Sartono Kartodirdjo, *peny., op. cit.*, hlm. 93.

terdapat pada setiap diri manusia. Meskipun demikian, pendidikan melalui pengamatan langsung menuntut kemampuan untuk berpikir kritis. Apabila menemukan berbagai nilai dan norma dalam masyarakat, Konfusius menekankan pentingnya untuk memahami tentang tujuan dari semua aktivitas itu. Dengan melihat pada tujuan tersebut, menurut Konfusius, berarti tetap terbuka kemungkinan untuk diadakan perubahan-perubahan terhadap setiap norma dan tradisi, meskipun sudah mapan, bila dipandang telah menyimpang dari tujuan semula.

Konfusius memberi nama pada manusia yang diidealkannya sebagai *Chun tzu* yang dapat diterjemahkan gentleman atau manusia agung. Menurut dia manusia agung adalah orang yang melaksanakan *li* (adat istiadat atau etika) dan *te* atau kebajikan pokok yang meliputi: integritas pribadi (*ching*), keadilan (*i*), kesetiaan (*chung*), toleransi (*shu*), dan perikemanusiaan (*jen*)<sup>12</sup>

Selanjutnya Konfusius menyatakan bahwa Chun tzu pernah ada pada masa awal dinasti Chou. Dia adalah seorang penguasa yang terkenal dengan sebutan Chou-kung (adik Wu Wang). Berdasar pada keberhasilan struktur masyarakat Chou dalam melahirkan manusia agung, anjuran yang disampaikan Konfusius adalah untuk kembali ke kehidupan seperti masa lalu, di mana para pemimpin negara masih dengan teguh memegang prinsip-prinsip kebajikan.

Dengan mengkonsentrasikan perhatiannya pada penguasa bukan berarti Konfusius mengabaikan unsur rakyat. Konfusius memandang rakyat sebagai unsur yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu negara. Dia percaya bahwa tanpa dukungan rakyat, suatu pemerintahan akan mengalami kehancuran. Meskipun demikian, Konfusius menempatkan rakyat lebih pada posisi sebagai obyek dari pada subyek dalam suatu negara.

Kecenderungan berpikir dengan menempatkan rakyat sebagai obyek, mengakibatkan sebagian besar perhatian Konfusius tertuju pada usaha mencari cara agar penguasa memperoleh dukungan (dalam arti "ketaatan") rakyat. Hal itu dapat dipahami dari pernyataannya bahwa dukungan rakyat akan diperoleh jika penguasa mengembangkan kebajikan dan memerangi kejahatan.<sup>13</sup> Dia tidak mengembangkan pemikiran pada usaha memperoleh dukungan rakyat dengan mempertinggi kesadaran politik rakyat dalam pengertian modern.

## **2. Mencius**

Pada kitab yang berbahasa Cina Mencius dikenal dengan nama Meng Tzu atau Guru Meng. Untuk memahami pemikiran politiknya, kiranya perlu untuk meninjau pandangannya tentang manusia. Meskipun pengikut Konfusianisme, Mencius mengembangkan sendiri pemahamannya tentang hakekat manusia. Menurut dia, manusia tidak hanya memiliki kemampuan berbuat baik, seperti

---

<sup>12</sup> Rene Grousset, *The Rise and Splendour of The Chinese Empire* (Los Angeles: University of California, 1953), hlm. 30. Lihat pula W.G.J. Rummelink, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>13</sup> Kenneth Scott Latourette, *op. cit.*, hlm. 71.

yang diajarkan Konfusius, tetapi memang pada dasarnya baik. Mencius mengambil contoh: "Seandainya seseorang melihat seorang anak kecil nyaris jatuh ke dalam sumur, tidak peduli siapapun orangnya, ia segera akan mengalami perasaan ngeri dan iba".<sup>14</sup> Perasaan yang muncul secara alamiah itu semata-mata karena simpati naluriah yang merupakan sebagian kebaikan dari hakekat manusia normal.

Sejajar dengan pandangannya tentang manusia, Mencius berpendapat bahwa negara seharusnya menjadi lembaga pengembang moral agar kebaikan yang menjadi hakekat manusia dapat tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, penguasa dalam konteks itu dipandang sebagai pemimpin di bidang moral. Seorang penguasa memiliki kewajiban untuk mendorong setiap warganya untuk mengembangkan kebajikan. Salah satu jalan penting yang harus ditempuh penguasa adalah memberi contoh dengan bertindak bijaksana.

Berbeda dengan Konfusius yang lebih banyak menempatkan rakyat sebagai obyek kekuasaan, Mencius memandang bahwa rakyat merupakan unsur terpenting dari negara. Rakyat, meskipun kedudukannya sebagai pihak yang diatur dan dikuasai, memiliki hak untuk mengontrol penguasa. Sesuai dengan ajaran Konfusius, seorang raja harus bertindak sebagai raja. Manakala seorang penguasa tidak lagi menggunakan moral sebagai landasan memerintah, rakyat berhak mengadakan revolusi untuk mengakhiri kekuasaannya. Pembunuhan terhadap penguasa seperti itu, menurut Mencius, bukan lagi merupakan kejahatan pembunuhan seorang raja. Alasan yang digunakan adalah kalau seorang raja tidak lagi bersikap sebagai raja, maka dia bukan lagi raja, tetapi sekedar seorang manusia biasa.

Mencius membedakan bentuk pemerintahan menjadi dua, yaitu *wang* (raja) dan *pa* (tentara). *Wang* merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh seorang raja, sedang *pa* adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang penguasa militer. Dalam uraiannya Mencius cenderung menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dilakukan oleh raja dengan catatan bahwa kebijaksanaan tidak terpisahkan dari pribadi raja tersebut. Ketidaksenangan Mencius kepada pemerintahan militer adalah kecenderungannya dalam menggunakan tindakan represif terhadap rakyat:

Pemerintahan seorang raja [bijaksana] dilaksanakan melalui pelajaran serta pendidikan moral; pemerintahan penguasa militer dilakukan melalui kekerasan serta paksaan. Kekuasaan pemerintahan bersifat susila, kekuasaan bersifat jasmani..... Bila seseorang menundukkan orang/ rakyat dengan kekerasan, maka dalam hati mereka tidak patuh kepadanya, melainkan hanya secara lahiriah mereka patuh selagi tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tetapi bila seseorang mendapatkan pengikut-pengikut melalui kebajikan, maka mereka berkenan di hati dan akan patuh secara sukarela seperti halnya tujuh puluh cantrik patuh kepada Konfusius.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> H.G. Creel, *Alam Pikiran Cina*. Terjemahan Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 92.

<sup>15</sup> Kutipan diambil dari Fung Yu Lan, *op. cit.*, hlm. 97-98.

Dari kutipan itu dapat dipahami bahwa penaklukan secara psikologis, menurut pandangan Mencius, akan dapat lebih kekal dari pada penaklukan militer. Pemerintahan militer hanya akan menghasilkan ketaatan semu dari rakyat. Apabila kesempatan terbuka, rakyat akan berusaha melepaskan tekanan pemerintah dengan jalan mengadakan aksi penentangan.

### **3. Hsun Tzu**

Tokoh itu sering dipandang sebagai salah satu titik ekstrim dari perkembangan Konfusianisme. Apabila pemikiran Mencius yang idealistik dianggap sebagai ekstrim kanan, maka pemikiran Hsun Tzu yang realistik dapat dikategorikan sebagai ekstrim kiri. Salah satu hasil permenungannya yang menjadikan Hsun Tzu terkenal adalah teorinya tentang hakekat manusia. Berkebalikan dengan Mencius, Hsun Tzu menyatakan bahwa manusia pada hakekatnya jahat. Dia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki nafsu untuk mencari keuntungan pribadi dan kesenangan inderawi dengan tanpa memperhatikan orang lain:

Manusia lahir dengan kesukaan akan keuntungan; jika kecenderungan ini diikuti, maka mereka akan gemar bertengkar serta rakus, sama sekali tidak mengenal basa basi dan tidak memperhatikan orang-orang lain. Sejak lahir mereka penuh dengan sifat iri hati serta benci terhadap orang-orang lain; apabila nafsu-nafsu ini dikekang mereka akan menjadi ganas serta keji...<sup>16</sup>

Dari kutipan itu dapat dipahami bahwa sifat iri hati manusia merupakan salah satu pertanda bahwa sifat jahat merupakan hakekat manusia yang dibawa sejak lahir. Selain masalah sifat jahat, dalam kutipan itu tampak bahwa Hsun Tzu memandang bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu ingin memperoleh keuntungan.

Pada bagian lain, Hsun Tzu melanjutkan pembahasannya tentang manusia sebagai makhluk ekonomi tersebut dengan mengkaitkannya pada masalah pemenuhan kebutuhan. Pemuasan terhadap hasrat-hasrat dasar manusia tidak mungkin dilakukan sendiri. Manusia yang satu membutuhkan yang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dicukupi sendiri. Dengan kata lain, meskipun manusia merupakan makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial:

Manusia orang seorang memerlukan dukungan hasil-hasil karya beratus-ratus kaum pekerja... Jika setiap orang hidup sendiri-sendiri, dan tidak saling melayani, maka kemiskinan yang akan terjadi.<sup>17</sup>

Dari kutipan itu dapat dipahami bahwa Hsun Tzu memandang hakekat sebagai

---

<sup>16</sup>Lihat pada H.G. Creel, *op. cit.*, hlm. 128.

<sup>17</sup>Fung Yu Lan, *op. cit.*, hlm. 193.

mahluk sosial tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Akan tetapi, sosialitas itu ada dalam rangka memenuhi dan memuaskan hasrat atau kepentingan manusia sebagai individu.

Problem yang muncul dari manusia sebagai mahluk ekonomi dan sebagai mahluk sosial adalah terjadinya hubungan sosial yang dilandasi motivasi ekonomi. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam masyarakat, yaitu hubungan yang saling menguntungkan atau sebaliknya hubungan saling memeras dan mengeksploitasi. Seajar dengan pandangannya bahwa manusia pada hakekatnya adalah mahluk yang jahat, Hsun Tzu cenderung ke pendapat yang kedua, yaitu bila dibiarkan bebas, maka kehidupan sosial akan diwarnai oleh perbenturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya kekacauan. Berdasar pemikiran tersebut, dia mengembangkan pemikiran tentang penguasa dan fungsinya. Penguasa dalam kerangka pikir Hsun Tzu dipandang sebagai pemegang otoritas untuk menciptakan nilai-nilai dan norma-norma yang dapat diterima oleh seluruh anggota suatu komunitas. Apabila terdapat nilai dan norma, maka perbenturan kepentingan dan kesewenangan pribadi dapat dicegah. Lebih lanjut Hsun-tzu menyatakan:

Bila terdapat kekacauan segala-galanya akan berakhir. Para raja tidak menyukai kekacauan ini, dan dengan demikian menetapkan *li* (aturan-aturan perilaku) dan *yi* (perikeadilan, moralitas) untuk mengakhiri kekacauan ini.<sup>18</sup>

Dari kutipan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penguasa dalam pandangan Hsun tzu adalah sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat agar rakyatnya hidup tertib, damai, tenteram dan bahagia. Hsun-tzu menggambarkan figur penguasa sebagai pemilik wewenang tertinggi dalam pembuatan norma atau peraturan yang bertujuan mengatur lalu lintas kepentingan rakyat, sehingga pemenuhan kepentingan seseorang tidak bertabrakan dengan dan merugikan kepentingan orang lain. Dari sudut itu, berbagai peraturan yang dikeluarkannya dapat dipandang memiliki fungsi mendidik masyarakat yang pada hakekatnya jahat menjadi baik.

Agar dapat menghasilkan hukum atau norma yang mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian, seorang penguasa harus memiliki kekuatan moral yang memadai. Maksudnya seperti yang dikatakan Konfusius, bahwa seorang raja harus bersikap sebagai raja dan seorang menteri bersikap sebagai menteri.

...If men are appointed to post but they have no over-all understanding of their duties, then the matters which do not specifically fall within their jurisdiction are bound to be neglected. Therefore there must be laws that prove applicable in practise and man in office who have an over-all understanding of their duties.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> William H. Macneill and Jean W. Sedlar, *Classical China* (New York: Oxford University Press, 1970), hlm. 66.

Dengan penekanan pada kekuatan moral penguasa, Hsun Tzu menegaskan bahwa hanya seorang Chun Tzu yang layak memegang kendali pemerintahan. Hal itu sesuai dengan ungkapan klasik yang mengatakan bahwa ketertiban lahir dari manusia luhur dan kekacauan lahir dari manusia hina.

Pentingnya peranan kekuatan moral penguasa dalam suatu negara didasarkan pada pandangan Hsun Tzu bahwa tujuan kekuasaan adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, apabila seorang penguasa telah menyimpang dari hakekat kekuasaan, rakyat tidak lagi berkewajiban memenuhi perintahnya. Penguasa yang menyimpang dipandang bukan sebagai penguasa lagi, tetapi sekedar manusia yang dipenuhi ambisi pribadi. Oleh karena itu, seperti Mencius, Hsun Tzu menganjurkan rakyat agar mengadakan revolusi untuk mengakhiri kekuasaan raja yang lalim.<sup>20</sup>

Hsun Tzu menyadari bahwa penguasa, meskipun peranannya penting, bukan merupakan satu-satunya unsur yang mempengaruhi ketertiban kehidupan masyarakat. Unsur lain yang cukup besar pengaruhnya adalah rakyat. Meskipun seandainya dalam suatu negara terdapat penguasa yang baik, hukum-hukum yang adil, tetapi apabila rakyat tidak mentaatinya, maka kekacauan yang akan terjadi. Oleh karena itu, Hsun Tzu menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan disiplin rakyat.

### **C. Kesimpulan**

Perang merupakan tragedi dalam kehidupan manusia, karena membawa korban yang begitu banyak. Tidak hanya harta benda yang menjadi korban, tetapi juga nyawa. Bahkan korban yang paling memilukan adalah matinya kemanusiaan. Orang dengan mudah menghilangkan hak orang lain untuk mencari kebahagiaan dan bahkan hak untuk hidup.

Matinya kemanusiaan tersebut mendorong berbagai kalangan yang peduli untuk bergerak mencari solusi. Mereka mengajarkan bagaimana seharusnya orang per orang menjalani hidup yang baik dan memperoleh kebahagiaan sejati. Salah satu aliran yang ajaran-ajarannya terkenal adalah Konfusianisme. Aliran ini dibangun oleh Konfusius dan kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya. Salah satu kata kunci ajaran Konfusianisme adalah moral. Seseorang akan menjadi baik apabila mampu terus menerus mengembangkan moralnya, baik melalui pendidikan maupun tradisi. Melalui pertimbangan moralnya, setiap individu dapat dengan merdeka menentukan sikap dan tindakannya.

---

<sup>20</sup> H.G. Creel, *op. cit.*, hlm.142.